



BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI  
KEPANITERAAN

# PENATAAN TATA LAKSANA

---

WBK | ZONA INTEGRITAS

Anggota:

1. **Arinta Sulistiyo Eko P.**
2. **Juliana Tikka Murni**
3. **Andhyta Andam Nadia**
4. **M. Doni Ramdani**
5. **Haifa Arief Lubis**
6. **M. Ramlan Aminudin**
7. **Arum Wulandari**
8. **Rama Juniadi**
9. **Pramana Aldyan Firzal**

## REFORM PENATAAN TATALAKSANA

### DATA DUKUNG REFORM POIN 2.ii.B

#### IMPLEMENTASI SPBE TELAH TERINTEGRASI DAN MAMPU MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN INTERNAL UNIT KERJA YANG LEBIH CEPAT DAN EFISIEN

1. *Screenshot* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPP) sebagai *one-stop application* dalam pekerjaan penanganan perkara yang dimanfaatkan oleh internal dan lintas unit kerja;
2. *Screenshot* aplikasi SIMPP bagian kejurupanggilan yang dapat membuat surat panggilan sidang secara elektronik;
3. *Screenshot* laman mkri.id bagian Risalah Persidangan yang dapat diunduh secara mandiri dan dimanfaatkan pula oleh Panitera Pengganti dalam menyusun Berita Acara Persidangan maupun putusan;
4. *Screenshot* sikd.mkri.id mengenai pengajuan permohonan cuti secara elektronik yang memudahkan pegawai dalam urusan administrasi;
5. *Screenshot* aplikasi Sistem Informasi Gaji Pegawai dan Pejabat (SIGAPP) sebagai perangkat pemantauan penghasilan bagi pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.

Profile of Triyono Edy Budhiarto, S.H.

Dashboard

PERMOHONAN

- Permohonan Online
Permohonan Pemohon
Permohonan Pihak Terkait

PERKARA

Perkara Dalam Proses

PUU

SKLN

PHP KADA

PHPU

Perkara Sudah Putusan

KONSULTASI

Konsultasi Chat Online (Simpel)

Konsultasi Online

Konsultasi Offline

LAPORAN

Permohonan

Pencarian Detail Perkara

Pencarian Detail Perkara



MAHKAMAH KONSTITUSI

Search input field

Cari

Total Row Ditemukan 35

Table with 1 row containing case details: 68/PUU-XX/2022, Pokok Perkara, Pemohon a.n, Detail Pemohon, Kuasa Hukum.



Dashboard

## PERMOHONAN

Permohonan Pemohon &lt;

Permohonan Pihak Terkait &lt;

## PERKARA

Perkara Dalam Proses &lt;

Perkara Sudah Putusan &lt;

## LAPORAN

Permohonan

Perkara dalam proses

Persidangan

Putusan

Panitera Pengganti



7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan" dan atas perintah Majelis Hakim, dengan ini memberitahukan kepada:

**Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H. dan Tasya Nabila** untuk selanjutnya disebut sebagai  
----- **Para Pemohon;**

yang memberikan kuasa kepada **Achmad Munadi, S.H.**

dalam perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materil Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar menghadap dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dimaksud **secara daring (online)** yang akan diselenggarakan pada:

hari	: <b>Rabu</b>
tanggal	: <b>23 Maret 2022</b>
waktu	: <b>09:00</b>
tempat	: Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
acara	: <b>Pemeriksaan Pendahuluan (I)</b>

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

PERMOHONAN

- Permohonan Pemohon <
- Permohonan Pihak Terkait <

PERKARA

- Perkara Dalam Proses <
- Perkara Sudah Putusan <

LAPORAN

- Permohonan
- Perkara dalam proses
- Persidangan
- Putusan
- Panitera Pengganti
- Undang-undang
- Rakanitulasi

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 80.62/PUU/PAN.MK/PS/02/2022  
Hal : Panggilan Sidang

21 Februari 2022

**Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI**  
di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6  
Jakarta - 10270

Dengan hormat, Sidang Pleno 8 Februari 2022 menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno lanjutan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.


Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** sebagai pemberi keterangan untuk menghadiri Sidang Pleno dimaksud **secara daring (online)** yang akan diselenggarakan pada:


hari	: Rabu
tanggal	: 23 Februari 2022
waktu	: 11:00
tempat	: Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
acara	: Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon (IV)

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.


Mengingat persidangan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi


PERMOHONAN

 Permohonan Pemohon <


 Permohonan Pihak Terkait <


PERKARA

 Perkara Dalam Proses <

 Perkara Sudah Putusan <

LAPORAN

 Permohonan

 Perkara dalam proses

 Sudah Ditandatangani Secara Digital

62132e740b6ca... 1 / 2 | - 86% + |     



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **88.66/PUU/PAN.MK/PS/02/2022** 21 Februari 2022  
Hal : Panggilan Sidang

**Yth. Presiden Republik Indonesia**  
di Jalan Veteran Nomor 17-18  
Jakarta, 10110

Dengan hormat, Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Plenc Pengucapan Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

RISALAH

- RISALAH



BERANDA > PERKARA > RISALAH SIDANG

RISALAH SIDANG

- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPKADA

29 Mar 2022  
09:52 WIB  
2022-03-29 09:52:00

Nomor Perkara : 20/PUU-XX/2021  
Pokok Perkara : PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
Acara Sidang : PENGUCAPAN PUTUSAN  
Di Unduh : 25  
File Pendukung :



File PDF

▶ 0:00 / 3:02:00

File Audio

29 Mar 2022  
09:52 WIB  
2022-03-29 09:52:00

Nomor Perkara : 10/PUU-XX/2022  
Pokok Perkara : PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
Acara Sidang : PENGUCAPAN PUTUSAN  
Di Unduh : 18  
File Pendukung :

12	12-10-2021 08:00:43	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur (Billy Barlian) <b>Penanda Tangan :</b> Andi Hakim	Kepala Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai <b>Tembusan :</b> Analisis Kinerja (Edwin Aditya Irawan)	Nota Dinas (Biasa)	pegawai an M. Ramlan <b>File Surat::</b>  file e-TTD Cutu Tahunan ramlan M 2.docx <a href="#">QR code aktif</a>
13	11-10-2021 17:40:43	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Analisis Hukum (Muhammad Ramlan Aminuddin), Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Disposisi (Biasa)	- Mohon ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan prosedur 
14	11-10-2021 17:09:08	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan <b>Tembusan :</b> Panitera	Disposisi (Biasa)	- ACC, permohonan dimaksud. - Terima Kasih. 
15	11-10-2021 17:07:39	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Sekretaris Jenderal	Teruskan	Yth. Bapak Sekjen, kami mohon persetujuan atas Cuti Tahunan An. Muhammad Ramlan Aminuddin (Analisis Hukum) untuk menghadiri pernikahan saudari/adek kandung di Makassar.
16	11-10-2021 16:27:53	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Teruskan	Bersama ini kami sampaikan permohonan Cuti Tahunan atas nama Ramlan Aminuddin, mohon arahan dan approved, terima kasih.
17	11-10-2021 15:47:34	Kepala Subbagian Hukum	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Teruskan	Mohon persetujuan Permohonan cuti tahunan tahun 2021 selama 3 (tiga) hari kerja a.n. Muhammad Ramlan Aminuddin.
18	11-10-2021 15:11:11	Analisis Hukum (Muhammad Ramlan Aminuddin) <b>Penanda Tangan :</b> Muhammad Ramlan Aminuddin, Ina Zuchriyah , Rafiuddin, Tatang Garjito	Kepala Subbagian Hukum <b>Tembusan :</b> Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur (Billy Barlian)	Nota Dinas (Biasa)	<b>File Surat::</b>  file e-TTD Form Cuti M Ramlan November 2021.docx <a href="#">QR code aktif</a>



No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
1	05-04-2022 14:29:27	Kepala Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur (Agni Rahayu), Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur (Bianca Kartika Sari), Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur (Nova Ayu Pratiwi), Pengelola Kepegawaian (Bianca Prakesi Talamati)	Teruskan	untuk diketahui dan dicatat untuk pengembangan administrasi pegawai
2	05-04-2022 14:16:11	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Kepala Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai	Teruskan	Mhn dijadikan masukan utk pengembangan sistem dashboard pegawai utk menu2 kepegawaian, trm ksh
3	05-04-2022 13:59:09	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Disposisi (Biasa)	mohon dikordinasikan dngn Tim IT laporkan hasilnya 
4	05-04-2022 10:52:28	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Teruskan	Kami sampaikan Masukan untuk pengembangan aplikasi dashboard pegawai (penyediaan menu cuti pegawai pada dashboard pegawai)
5	05-04-2022 10:44:20	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Nota Dinas (Biasa)	Yth. Karo HAK. Kami sampaikan draft nota dinas penyampaian usulan penambahan menu informasi cuti di dashboard pegawai. Mohon koreksi dan persetujuan. Terima kasih.
6	05-04-2022 09:46:51	Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Teruskan	Izin meneruskan nota dinas masukan terkait pengembangan aplikasi dashboard pegawai (penyediaan menu cuti pegawai pada dashboard pegawai) yang merupakan hasil pembahasan internal pegawai biro HAK. Dokumen ini merupakan data dukung WBK ZI area penataan Tata Laksana. Tks.
7	04-04-2022 08:37:51	Analisis Hukum (Muhammad Ramlan Aminuddin) <b>Penanda Tangan :</b> Tatang Garjito	Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan <b>Tembusan :</b> Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Arianto, Gultiano)	Nota Dinas (Biasa)	<b>File Surat::</b>  file e-TTD 395_220405092559draf.docx <a href="#">QR code aktif</a>



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIGAPP

Sistem Informasi Gaji Pegawai & Pejabat



[Beranda](#)

[Referensi](#)

[Laporan](#)

[Log Off](#)



GAJI INDUK



TUNKIN



HDPP



LEMBUR



MAKAN



PENDAPATAN LAIN

::16-March-2022::Dengan hormat, diberitahukan kepada seluruh PNS bahwa Uang Makan Februari 2022 telah ditransfer pada tanggal 16 Maret 2022. Terimakasih. ~ Biro Renkeu ~

NIP : 199010062[REDACTED]  
NAMA : MUHAMMAD RAMLAN AMINUDDIN, S.H.M.H.  
JABATAN : Analis Hukum  
NPWP : [REDACTED]

NIP : 199010062[REDACTED]  
NAMA : MUHAMMAD RAMLAN AMINUDDIN, S.H.M.H.  
JABATAN : Analis Hukum  
NPWP : [REDACTED]

## INFORMASI GAJI TAHUN 2022

JENIS GAJI	TOTAL	RATA - RATA
GAJI POKOK	Rp. [REDACTED]	Rp. [REDACTED].900
TUNKIN	Rp. [REDACTED]	Rp. [REDACTED].950
HDPP	Rp. [REDACTED]	Rp. [REDACTED].783
UANG MAKAN	Rp. [REDACTED]	Rp. [REDACTED]
UANG LEMBUR	Rp. 0	Rp. 0
PENDAPATAN LAIN	Rp. 0	Rp. 0
TAKE HOME PAY	Rp. [REDACTED]	Rp. [REDACTED]

## INFORMASI GAJI BULAN MARET 2022

JENIS GAJI	TOTAL
GAJI POKOK	Rp. 3.269.900
TUNKIN	Rp. 3.915.950
HDPP	Rp. 0
UANG MAKAN	Rp. 0
UANG LEMBUR	Rp. 0
PENDAPATAN LAIN	Rp. 0
TAKE HOME PAY	Rp. 7.185.850

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des